



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 2 Telp. 44341, 22817, Fax. (0761) 44342

PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
Nomor 524.1/Kpts/PKH-SEKR/1/2017/73

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas perangkat daerah dan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dokumen perencanaan dan optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan di Provinsi Riau serta untuk mendukung rangkaian sistematis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan penetapan indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;

- MENINGGAT :**
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang dan Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4614);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4614);



BERSIH HATI
TEGAK INTEGRITAS
KERJA PROFESIONAL
UNTUK INDONESIA TANGGUH
MELALUI UPSUS SIWAB

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 14);
15. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.784/XI/2014 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
16. Keputusan Gubernur Riau Nomor : 109 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
17. Keputusan Gubernur Riau Nomor : 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Provinsi Riau;

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU**
- Pertama** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Setiap Pejabat yang menduduki jabatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau agar dapat menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau setiap tahunnya berdasarkan kerangka waktu tercantum dalam dokumen dimaksud;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Januari 2017

h
KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU


drh. ASKARDIYA R. PATRIANOV, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19591117 198303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Inspektorat Provinsi Riau di Pekanbaru ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru.



LAMPIRAN 2.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

NO	PROGRAM	INDIKATOR
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak
3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi daging (kg)
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah kelompok yang mendapat akses pemasaran (kelompok)

Pekanbaru, 9 Januari 2017

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



drh. ASKARDIYA R. PATRIANOV, MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19591117 198303 1 005


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1	NAMA UNIT ORGANISASI :	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	
2	TUGAS	Menyelenggarakan pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan dan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
3	FUNGSI	<p>a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang produksi peternakan Bidang Agribisnis peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang produksi peternakan Bidang Agribisnis peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang produksi peternakan Bidang Agribisnis peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>d. Menyelenggarakan administrasi pada sekretariat, bidang produksi peternakan Bidang Agribisnis peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	
4	INDIKATOR KINERJA UTAMA :		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pembangunan Sub Sektor Peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor peternakan	$\frac{\text{indeks yang diterima petani (It)}}{\text{indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100\%$	BPS Provinsi Riau
2	Tersedianya hasil pertanian dan peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah	Jumlah Produksi Daging Sapi dan Kerbau (kg)	Jumlah produksi daging sapi dan kerbau dalam satu tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pekanbaru, 9 Januari 2017


 KEPALA DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


 DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 PROVINSI RIAU

drh. ASKARDIYA R. PATRIANOV, MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19591117 198303 1 005